



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH**

TAHUN 2025

RENTA AWAL (RANWAL)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (**RENJA**) Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. Renja ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Tahun 2025-2026. Yang Mana renstra ini dituangkan dalam Aplikasi “Sistem Informasi Perencanaan Daerah” (SiCanda) Bappeda Kabupaten Mempawah, sebagai Rancangan Awal Renja di Organisasi Perangkat Daerah dan Mulai Berjalan Pada Tahun 2021. Rencana Kerja (**RENJA**) ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan Organisasi Perangkat Daerah dapat mencetak Matrik Renja Tahun 2025 sebagai Lampiran Dokumen Renja Perangkat Daerah.

Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Rencana Kerja (**RENJA**) ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Namun kami juga menyadari bahwa Rencana Kerja (**RENJA**) ini masih belum sempurna,

oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Besar harapan kami atas terealisasinya usulan program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam Renja ini. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Rencana Kerja (**RENJA**) ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menggantikannya dengan pahala yang berlipat dan menjadi amal yang diridhoi.

Mempawah, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mempawah



ROKHMAT EFFENDY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660515 199302 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	1
2. LANDASAN HUKUM.....	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMB. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AANAK, PEMB. MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023	6
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENJA.....	6
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	20
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
II.4 REVIEW TERHADAP (Rancangan Awal) RKPD.....	25
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	26
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....	27
III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	27
III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RKP 2023	28
III.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS	28
BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN.....	30
BAB IV : PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

TABEL 1	:	Pengukuran kinerja utama terhadap Rencana Strategis (Renstra)	17
TABEL II	:	Rekap hasil pelaksanaan renja SKPD dan capaian renstra s.d tahun 2023	36
TABEL III	:	Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Dan Perkiraan 2026	44
TABEL IV	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Preangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ...	51

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja atau RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses Penyusunan Renja berpedoman dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dan memperhatikan aspirasi atau usulan kegiatan proposal dari masyarakat. Keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen lainnya dilihat dari tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk SKPD adalah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah 2025-2026 untuk perencanaan dengan jangka waktu dua tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah 2020-2024.

Untuk melaksanakan rencana tahunan diharuskan menyusun Rencana Kinerja (**RENJA**) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah setiap tahunnya pada setiap awal tahun anggaran, sedangkan untuk tingkat Kabupaten menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan Rencana Kerja semua SKPD (RENJA SKPD) termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah artinya

sebelum RKPD disusun masing-masing SKPD harus menyusun Renjanya terlebih dahulu. Pelaksanaan dari Rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) yang menggambarkan hasil capaian kegiatan dari Rencana Kinerja setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dari Penjelasan diatas artinya Rencana Kinerja (RENJA) di tahun 2025 merupakan penetapan kegiatan/proyek, terutama untuk Belanja Langsung secara tahunan melalui indikator kinerja serta targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang terpilih yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah 2025-2026. ***Renja tersebut selanjutnya dihimpun dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sampai pada penyusunan RKA dan DPA.***

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengelolaan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator 1 Masukan (input) 2. Keluaran (output) 3. Hasil (outcome), gunanya untuk mengukur efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah 2025-2026.

2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah adalah ;

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan provinsi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 050/PMK Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2025 yang sedang berjalan, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Mempawah :

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 kedalam rencana pembangunan tahunan yang di sinkronkan dengan rencana pencapaian sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2026
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2025
3. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran tahun 2020 – 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 , Yaitu :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN LALU

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah review terhadap rancangan awal renja dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, dan rumusan rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBAERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan recana capaian renstra DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah 2025-2026 serta capaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa review terhadap rancangan awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

II. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA SKPD

Berdasarkan tugas Pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah menyelenggarakan empat urusan yaitu urusan Sosial, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan Pemerintahan Desa. Sebelum mengevaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 kita harus mengetahui Visi dan Misi di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ada pun Visi dan Misi serta Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tersebut di rumuskan dengan isu-isu strategis baik dari dalam maupun dari luar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. Adapun Visi, Misi dan Indikator sasaran dimaksud sebagai berikut :

1. VISI

Ada beberapa definisi tentang visi yang dikemukakan para pakar, dan pada dasarnya semua definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama, yakni pandangan mengenai kondisi masa depan.

Berdasarkan pengertian diatas maka rumusan visi dalam renstra dinas ini adalah gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan keinginan dinas dan merupakan cita dan citra yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

1. Pernyataan Visi

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS”

2. Penjelasan Makna Pernyataan Visi

- a. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Pemberdayaan Masyarakat yang Berkualitas adalah penyadaran untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada masyarakat yang memungkinkan, memanfaatkan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan.

2. MISI

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu Visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah, harus diemban atau dilaksanakan oleh institusional pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi

sesuai dengan strategi yang telah dipilih memperhatikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Tujuan berdimensi waktu jangka panjang (1 sampai 5 tahun). Untuk mencapai tujuan maka setiap periode (bulan/triwulan/semester/tahun atau satuan waktu yang lebih pendek dari tujuan) ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan.

Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja Kabupaten, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksananya. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

❖ **Misi Pertama: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.**

Tujuan:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Sasaran:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial

❖ **Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Tujuan:

1. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta meningkatkan peran perempuan.

Sasaran:

1. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender

❖ **Misi Ketiga: Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.**

Tujuan:

1. Memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran:

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

❖ **Misi Keempat: Meningkatkan Kualitas Manajemen, Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa**

Tujuan:

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa.

Sasaran:

1. Terciptanya kelembagaan pemerintahan desa yang efisien dan efektif

❖ **Misi Kelima: Meningkatkan Pelayanan Prima**

Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Aparatur dan Masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 melaksanakan 16 program utama, 31 kegiatan dan 105 sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan/Material
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- g. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. **Program Pemberdayaan Sosial**
 - a. **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 - b. **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

- a. **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Keluhan Asal**
 1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Keluhan Asal
4. **Program Rehabilitasi Sosial**
 - a. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 5. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 6. Pemberian Layanan Rujukan
 - b. **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 3. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
5. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
 - a. **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**
 1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 2. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - b. **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
7. **Program Penangan Bencana**
 - a. **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 - b. **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
8. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
 - a. **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
9. **Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
 - a. **Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. **Program Perlindungan Perempuan**
 - a. **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
11. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
- a. **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
12. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
- a. **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. **Program Perlindungan Khusus Anak**
- a. **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

1. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA
- b. **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
14. **Program Penataan Desa**
 - a. **Penyelenggaraan Penataan Desa**
 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
15. **Program Peningkatan Kerja Sama Desa**
 - a. **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**
 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
16. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**
 - a. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**
 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 8. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 9. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
 10. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 11. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

17. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPK, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPK, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
10. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

11. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada rencana Kerja tahun 2025 terdapat 4 sasaran strategis yang dibahas yaitu, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sebagaimana berikut :

TABEL I
Pengukuran kinerja utama terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja Utama	Target Capaian Kinerja Renstra 2024	Target Capaian Kinerja Renstra 2023			Target Kinerja Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian kinerja Tahun 2025		
					Target	Realisasi	%		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Visi : Terwujudnya Kabupaten Mempawah Maju dan Berdaya Saing											
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial											
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesekretariatan	1	Persentase Tingkat Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
2.	Menurunkan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Bagi PSKS dan PPKS		Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan kesejahteraan sosial	75				75	80	
				Persentasase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan kesejahteraan sosial					70	75	
		Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan		Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan							
		Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa									
3.	Meningkatkan Ketahanan Kebencanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		Persentase Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana					100	100	100
4.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak		Angka IPM Perempuan							
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender		Angka IPM Perempuan							

5.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Pemerintahan Desa dalam penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa	80							
			Persentase Desa Yang Meningkatkan Statusnya								
		Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa	Persentase Bumdes dan Bumdesma Yang Aktif dan Maju								
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak											
2.1	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
			2 Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang dapat diselesaikan	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
			3 Jumlah organisasi wanita yang dibina	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
			4 Persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
Misi 3 : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan											
3.1	Memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang telah diberdayakan	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
			2 Jumlah kelompok usaha yang dibina	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
			3 Jumlah stimulan yang telah disalurkan dalam pembangunan desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Manajemen, Aparatur, dan Lembaga Pemerintahan Desa											
4.1	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan desa	Terciptanya kelembagaan pemerintahan desa yang efisien	1 Kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
			2 Kelancaran desa yang dapat mengelola keuangan dengan tertib	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
			3 Tingkat kesejahteraan aparatur desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
			4 Jumlah desa yang telah memiliki tata batas desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Prima											
5.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Rasio Pemenuhan Ruang Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4 Persentase lingkungan Perkantoran dengan Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6 Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7 Persentase tingkat kehadiran aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8 Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			9	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan akhir tahun Pemda/SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			10	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemda/SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan adalah sebagai berikut :

I. Program/Kegiatan tahun 2023 yang tidak mencapai target adalah :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa / Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa / Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
2. Program Perlindungan Perempuan / Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
3. Program Perlindungan Khusus Anak / Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)

II. Program/Kegiatan tahun 2023 yang mencapai target adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7. Program Perlindungan Perempuan
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
9. Program Pemenuhan Anak (PHA)
10. Program Perlindungan Khusus Anak
11. Program Penataan Desa

12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

III. Program/Kegiatan tahun 2022 yang melebihi target adalah :

Untuk tahun 2022 tidak terdapat program yang melebihi target yang di tentukan.

*Data Tabel Terlampir realisasi capaian Program / kegiatan Pelaksanaan

Renja Tahun 2023.

II. 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil penyusunan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam rencana kinerja disajikan strategi yang relevan dengan sasaran yang telah di tetapkan. Ada 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama yang ingin di capai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah . yaitu :

1. Persentase pemberdayaan dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin.
2. Persentase pemberdayaan komunitas adat terpencil yang telah di berdayakan
3. Persentase pemberdayaan organisasi sosial yang telah mendapat pembinaan dan diberdayakan
4. Persentase bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial yang telah disalurkan
5. Persentase pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah ditangani
6. Persentase peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikembangkan
7. Presentase peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan
9. Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang dapat diselesaikan
10. Jumlah organisasi wanita yang dibina
11. Persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif
12. Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang telah diberdayakan
13. Jumlah kelompok usaha yang dibina
14. Jumlah stimulan yang telah disalurkan dalam pembangunan desa
15. Kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa
16. Kelancaran desa yang dapat mengelola keuangan dengan tertib
17. Tingkat kesejahteraan aparatur desa
18. Jumlah desa yang telah memiliki tata batas desa

A. Bidang Sosial

Kinerja Bidang Sosial Tahun 2023 meliputi :

1. Melakukan Pendampingan pemberdayaan melalui Fasilitasi Manajemen Keluarga Miskin melalui bantuan 20 Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE);
2. Memberikan Bahan Baku bangunan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 200 Kepala Keluarga dan Memfasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
3. Memberikan Pelatihan dan Keterampilan Pada Keluarga Miskin;
4. Memberikan Pelatihan dan Keterampilan pada Penyandang Disabilitas, Korban penyalahgunaan Obat dan Narkotika, Anak Terlantar, Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Meliputi :

1. Memfasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah dan Hari Kartini;

2. Melayani dan memfasilitasi pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan;
3. Melayani pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak dan memfasilitasi pendampingan terhadap pelaku dan korban kekerasan pada anak;
4. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk menangani masalah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
5. Memberikan bantuan pendampingan kepada Korban KDRT, Pencabulan, Penganiayaan Perempuan dan Anak.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja Bidang pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan dan pembinaan pada Lembaga dan Organisasi Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar Lembaga, organisasi, dan kader masyarakat mampu dan mau membangun mandiri baik di lingkungan keluarga bagi kader maupun lingkungan masyarakat bagi lembaga dan organisasi kemasyarakatan yaitu :

1. Memfasilitasi kegiatan pelatihan kepada perangkat desa untuk menyusun profil desa, dan usaha ekonomi desa (UED);
2. Bekerjasama dengan perangkat desa mempromosikan hasil usaha desa dan menggali sumber daya alam yang ada di desa melalui Pameran dan loka karya Teknologi Tepat guna serta perlombaan desa dan kelurahan;
3. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan BBGRM dan Tentara Manunggal Membangunan Desa (TMMD)

D. Bidang Pemerintahan Desa

Kinerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 meliputi :

1. Memfasilitasi kegiatan pelatihan kepada perangkat desa untuk menyusun penyusunan alokasi dana desa ;
2. Memfasilitasi penyusunan APBDes dan Evaluasi Penggunaan APBDes;

3. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan E-Voting di 30 Desa Se-Kabupaten Mempawah;
4. Melaksanakan pelantikan hasil dari pemilihan Kepala Desa dan Anggota BPD di 6 Desa sebanyak 65 Orang;

II. 3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Anggaran yang di sediakan melalui APBD Kabupaten Mempawah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang memadai;
2. Jumlah pegawai dari segi Kuantitas masih perlu di tambah;
3. Masih rendahnya SDM perangkat desa;
4. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai;
5. Kurang mengertinya masyarakat dalam hal kekerasan baik pada perempuan, anak dan rumah tangga;
6. Belum adanya tenaga tetap yang menangani rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;

Permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Mempawah. Hal ini berkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah SKPD sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang berkaitan.

Tantangan yang di hadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, adalah :

I. Urusan Sosial

1. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks hanya ditangani oleh 1 (satu) bidang
2. Kurangnya jumlah pegawai yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial
3. Minimnya dana pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Tidak adanya sarana untuk pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Kesejahteraan

Sosial lanjut Usia, hal ini karena kurang pedulinya dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap permasalahan Kesejahteraan sosial

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sumber daya aparatur pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya

III. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Masih Kurangnya pendelegasian Tupoksi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

IV. Urusan Pemerintahan Desa

1. Sumberdaya aparatur yang terbatas dari segi kuantitas di bidang pemerintahan desa Dinas Sosial, PPPA, PM dan Pemdes
2. Adanya perbedaan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana desa di tingkat kementerian memberikan dampak perbedaan pemahaman desa dalam menginterpretasikan kebijakan tersebut

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran dari permasalahan diatas, guna tercapinya Visi dan Misi, yaitu :

I. Urusan Sosial

1. Adanya penambahan pegawai yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial, dan menugaskan pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
2. Melakukan pendataan dan pemetaan sosial melalui Program Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
3. Menambah Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial seperti tempat dan kendaraan operasional tanggap darurat bencana, serta mobil Unit Pelayanan Sosial Keliling UPRSK, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Rehabilitasi Penyalagunaan Obat Narkotika.

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mengantisipasi kurangnya jumlah aparatur, Bidang PPPA terus menjalin kerjasama yang baik dengan KPAID Kabupaten Mempawah, Polres Mempawah dan Instansi dan OPD lain.

III. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan kiranya bisa di tambah struktural eselon IV.B serta pelaksana dari disiplin ilmu pemberdayaan masyarakat untuk menangani tupoksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Serta adanya dukungan dana untuk melaksanakan konsultasi di kementerian dan Provinsi. Serta adanya kesatuan arah baik itu di pusat maupun di Pemerintah Tingkat atas dalam penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

IV. Urusan Pemerintahan Desa

1. Melibatkan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan langsung terhadap 60 desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Pembagian uraian tugas yang jelas kepada seluruh pelaksana / fungsional umum bidang pemerintahan desa guna optimalisasi pelaksanaan realisasi kinerja.

II. 4. REVIEW TERHADAP (Rancangan Awal) RKPD

Usulan rencana program dan kegiatan awal yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra DSPPPAPMPD untuk tahun 2023, terdiri dari 14 Program dan 22 kegiatan serta 62 sub kegiatan dengan total anggaran untuk belanja langsung berjumlah **Rp.9.565.778.271,- (Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satun Rupiah).**

Penyusunan rancangan Renja Dinas SPPPAPMPD Kabupaten Mempawah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah dan tingkat kerja yang di capai DSPPPAPMPD, dengan arahan Bupati Mempawah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Riview terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, di lakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu di lakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan DSPPPAPMPD. Usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai dengan tema RKP Nasional Tahun 2022 **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dengan menerapkan 5 Program Nasional , yaitu :

- (1) Pembangunan Nasional dan Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan pemerataan Wilayah;
- (3) Nilai Tambah Sektor Riil dan Industrialisasi serta memperluas kesempatan Kerja;
- (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta
- (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran dari Program Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar di bidang Sosial :

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak;
3. Urusan Sosial Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan pangan Non Tunai;

4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menitik beratkan pada Pelayanan Ramah Anak, Edukasi dan Informasi Hak Anak atas ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, dan Pembatasan Konsumsi GGL dan Edukasi dan Informasi Bahaya Rokok dan Pentingnya Kesehatan Reproduksi
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
6. Urusan Pemerintahan Desa

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RKP 2025

Arah kebijakan dan strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dari RKP 2025 :

1. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
2. Penguatan Sistem Jaminan Sosial
3. Penyediaan Akses Hunian YLayak dan Terjangkau
4. Percepatan Pembangunan Desa
5. Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi

III.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS

Sebagai penjabaran dari Misi dan Visi tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif, harus searah dengan Visi dan Misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, untuk menanggapi isu-isu strategis maka Sasaran selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

❖ Misi Pertama : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Sasaran:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial

❖ **Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Tujuan:

1. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta meningkatkan peran perempuan.

Sasaran:

1. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender

❖ **Misi Ketiga : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.**

Tujuan:

1. Memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran:

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

❖ **Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Manajemen, Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa**

Tujuan:

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa.

Sasaran:

1. Terciptanya kelembagaan pemerintahan desa yang efisien dan efektif

❖ **Misi Kelima : Meningkatkan Pelayanan Prima**

Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Aparatur dan Masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada 2023 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan Nasional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 melaksanakan 16 program utama, 31 kegiatan dan 105 sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**
 - a. **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**
 1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3. **Program Rehabilitasi Sosial**
 - a. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 5. Pemberian Layanan Rujukan
 - b. **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 3. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
4. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
 - a. **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**
 1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 2. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - b. **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. **Program Penangan Bencana**
 - a. **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 - b. **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
 - a. **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
 - a. **Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - b. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
8. **Program Perlindungan Perempuan**
 - a. **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
9. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
 - a. **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
10. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
 - a. **Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

- Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
- 11. Program Perlindungan Khusus Anak**
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 12. Program Penataan Desa**
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa**
 - 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 - 2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- 13. Program Peningkatan Kerjasama Desa**
 - a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**
 - 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - 2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 14. Program Administrasi Pemerintahan Desa**
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**
 - 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - 6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - 7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - 8. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

9. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
10. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
11. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
12. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
13. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
10. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
11. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap para pelaku dunia usaha di wilayah Kabupaten Mempawah dengan mengacu sesuai dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2024 ini dapat digunakan dalam melaksanakan tugas dengan baik, rutin maupun pengentasan kemiskinan, perlindungan dan pendampingan sosial , perempuan dan anak serta pendampingan masyarakat dan pembangunan Pedesaan. Tentu saja banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Mempawah seperti penambahan sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dapat dilaksanakan untuk mendukung Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Mempawah.

Tabel II
Rekap hasil pelaksanaan renja SKPD dan capaian renstra s.d tahun 2024

No	Unitas/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kembangan Kesejahteraan Sosial	70%	0%							
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80%	0%							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang ntu Barang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%								
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126 Orang	117 Orang	-	-	-	126 Orang	126 Orang	100%	
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	-	-	-	-	9 Keluarga	9 Keluarga	100%	
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Keluarga	-	-	-	-	-	-	0%	
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kembangan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	28 Lembaga	-	-	-	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	-	-	-	-	30 Sertifikat	30 Sertifikat	100%	
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Rata-rata PMKS yang Di tangani	100%								
	Penulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%								
	Facilitasi Penulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial	60%								
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	20%								
	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	90 Orang	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	0 Orang							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja restra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	Penyediaan Alat Bantu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0 Orang							
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang							
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	0 Orang							
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang							
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	20%								
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang							
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	35 Orang							
	Kerja Sama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen							
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Komunitas Adat Terpencil Yang Mendapat Bantuan Sosial	60%								
	Pemeliharaan Anak-Anak Terhantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terhantar	40%								
	Penjangkauan Anak-Anak Terhantar	Jumlah Anak-Anak Terhantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	666 Orang							
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terhantar	Jumlah Anak Terhantar yang Terpenuhi dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Buah	0 Orang							
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Mempawah	30%								
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15000 Orang	0 Orang							
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentusan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3 Keluarga	3 Keluarga							
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyaluran Penanganan Bencana Alam Yang Dibantu	60%								
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS	60%								
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	990 Orang							
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Paksi dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	0 Orang							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Mempawah	60%								

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja restra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung							
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	0 Orang							
	Program Pengedalaan Areal Pemakaman	Persentase Capaian Pengelolaan Area Pemakaman	80%								
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah	60%								
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	0 Makam							
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	0 Laporan							
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kualitas perempuan	75%								
	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi dan pendampingan Pelaksanaan PUG									
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi PUG PPRG keseluruhan OPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan							
	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen							
9	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dapat diselesaikan	70%								
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah							
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%								
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	11 Orang							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	0 Layanan							
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kelompok Yang Terbina	65%								
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	50%								
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen							
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Laporan	18 Laporan							
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHAA)	Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan Kualitas Anak	74%								
	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	75%								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelanggaran Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelanggaran Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Atas Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	75%								
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1 Organisasi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelanggaran Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen							
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak	82%								
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi PBAP	50%								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen							
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi PBAP	25%								
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan/pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35 Kasus							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja restra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan							
12	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Batas	70%								
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	30%								
	Pemberitahuan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pemberitahuan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	2 Desa							
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	1 Unit							
13	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa Mandiri	50%								
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa	50%								
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	0 Dokumen							
13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Peraturan Desa	75%								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30%								
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	3 Dokumen							
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	120 Dokumen	120 Dokumen							
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	3 Orang							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	60 Laporan	0 Laporan							
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	42 Dokumen	0 Dokumen							
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	19 Laporan	0 Laporan							
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen							
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	60 Dokumen	0 Dokumen							
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang	0 Orang							
	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengawasan Batas Desa	15 Desa	10 Desa							
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	60 Dokumen	60 Dokumen							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Yang Dibina	80%								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Jumlah pelaksanaan bintek kader Pemberdayaan Masyarakat	60%								
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2060 Lembaga	0 Lembaga							
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	290 Unit	0 Unit							
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan							
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	60 Laporan	0 Laporan							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keltetriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keltetriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	60 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	60 Dokumen	0 Dokumen							
20	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	75%								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80%								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen								

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Laporan								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 Laporan								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	80%								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola	80%								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	80%								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	100%	34 Laporan	34 Laporan	100%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Penyediaan Penunjang Urusan Kantor	100%								
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	-	-	-	-	-	12 Unit	100%	
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	-	-	-	-	-	55 Unit	100%	

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	14 Unit	-	-	-	-	-	14 Unit	100%	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	4 Unit	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	-	-	6 Unit	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	-	-	-	-	-	3 Unit	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	80%								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	80%								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	100%	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	

Tabel : III

RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025

URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Rp 4.644.241.200			Rp 4.644.241.200
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial	Rp 1.551.408.000			Rp 1.551.408.000
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya keterlibatan dalam pengumpulan sumbangan	Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
1	06	02	2.02	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	Rp 10.000.000	10 kali	DSPPPAPMPD	Rp 10.000.000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSK)	Rp 1.541.408.000			Rp 1.541.408.000
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah SDM Petugas, Pendamping Sosial Dan Keluarga Penerima Manfaat Pemberdayaan Fakir Miskin Dan PMKS Lainnya yang mendapatkan Bimbingan Teknis	Rp 319.525.000	126 orang	DSPPPAPMPD	Rp 319.525.000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Profesional	Rp 127.900.000	9 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 127.900.000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Kesejahteraan Keluarga Yang Ditingkatkan Potensinya	Rp 484.427.000	3 Program	DSPPPAPMPD	Rp 484.427.000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga Yang meningkat Prestasinya (KUBE, Karang Taruna, Orsos, PSM, Pendamping PKH, TKSK)	Rp 513.906.000	30 orang	DSPPPAPMPD	Rp 513.906.000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Kabupaten/kota	Jumlah Kasus/Pemusalahan Keluarga Yang ditangani	Rp 95.650.000	30 kasus	DSPPPAPMPD	Rp 95.650.000
1	06	02			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindakan Kekerasan'	Rp 15.000.000			Rp 15.000.000
1	06	02	2.02		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 15.000.000			Rp 15.000.000
1	06	02	2.02	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarKasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/kota	Rp 15.000.000	6 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 15.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rp 1.285.183.200			Rp 1.285.183.200
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Luar panti	Rp 761.410.000			Rp 761.410.000
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Pemakanan untuk meningkatkan kebutuhan dasar lansia	Rp 200.000.000	50 orang	DSPPPAPMPD	Rp 200.000.000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/kota	Rp 75.000.000	70 orang	DSPPPAPMPD	Rp 75.000.000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/kota	Rp 105.000.000	70 orang	DSPPPAPMPD	Rp 105.000.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah eks Penyandang Trauma yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Rp 250.000.000	70 orang	DSPPPAPMPD	Rp 250.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Terlaksananya analisa data dan permasalahan anak terlantar	Rp 65.705.000	2 Program	DSPPPAPMPD	Rp 65.705.000
1	06	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial yang terlaksana bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), korban eksploitasi Anak Dan perempuan	Rp 65.705.000	40 pendampingan	DSPPPAPMPD	Rp 65.705.000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV AID dan Napza di Luar Pant Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya	Rp 523.773.200			Rp 523.773.200
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar aids dan Napza yang mendapatkan Bimtek	Rp 72.773.200	20 orang	DSPPPAPMPD	Rp 72.773.200
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Pendamping yang melaksanakan Bimbingan Penguatan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp 425.000.000	41 Pendamping, 7.799 KK	DSPPPAPMPD	Rp 425.000.000
1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga Kemitraan dalam Pelaksanaan Reliabilitas Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Ruzia Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya	Rp 26.000.000	2 kali	DSPPPAPMPD	Rp 26.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Pendataan keluarga miskin dan penerima Bantuan Program perlindungan Sosial	Rp 747.150.000			Rp 747.150.000
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pemeliharaan, Penjangkauan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar	Rp 275.000.000			Rp 275.000.000
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar dan LKSA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Rp 200.000.000	40 anak, 2 LKSA	DSPPPAPMPD	Rp 200.000.000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000		DSPPPAPMPD	Rp 75.000.000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan penerima Program perlindungan Sosial Tepat sasaran.	Rp 472.150.000			Rp 472.150.000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin dan Penerima Bantuan Perlindungan Sosial (BPNT, PHI)	Rp 18.900.000	34.571 KK	DSPPPAPMPD	Rp 18.900.000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan	Rp 453.250.000	3 data	DSPPPAPMPD	Rp 453.250.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksananya Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial	Rp 814.000.000			Rp 814.000.000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Rp 600.000.000			Rp 600.000.000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Kecamatan yang mengalami bencana	Rp 400.000.000	7 Kecamatan	DSPPPAPMPD	Rp 400.000.000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang		Rp 200.000.000		DSPPPAPMPD	Rp 200.000.000
1	06	06			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	Rp 214.000.000			Rp 214.000.000
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Rp 120.000.000	3 lokasi	DSPPPAPMPD	Rp 120.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana	Rp 94.000.000	48 orang	DSPPPAPMPD	Rp 94.000.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terselenggaranya Pengelolaan Taman Makam pahlawan Kabupaten	Rp 231.500.000			Rp 231.500.000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Makam pahlawan Nasional	Rp 231.500.000			Rp 231.500.000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
								JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
1	06	07	2.01	01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota	Rp 150.000.000	1 Lokasi	DSPPAPMPD	Rp 150.000.000
1	06	07	2.01	02	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Rp 57.500.000	1 Makam	DSPPAPMPD	Rp 57.500.000
1	06	07	2.01	03	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 24.000.000	1 Lokasi	DSPPAPMPD	Rp 24.000.000
JUMLAH								Rp 4.644.241.200			Rp 4.644.241.200

Tabel : III

RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp 1.978.720.200			Rp 1.978.720.200
02	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial	Rp 90.000.000			Rp 90.000.000
02	08	02	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG	Rp 30.000.000			Rp 30.000.000
02	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi PUG ke seluruh OPD	Rp 30.000.000	2 Kali	DSPPPAPMPD	Rp 30.000.000
02	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Rp 60.000.000	-		Rp 60.000.000
02	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Rp 60.000.000	-	DSPPPAPMPD	Rp 60.000.000
02	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
02	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan	Rp 137.720.200			Rp 137.720.200
02	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 60.000.000	-	DSPPPAPMPD	Rp 60.000.000
02	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 19.000.000	2 Perangkat Daerah	DSPPPAPMPD	Rp 19.000.000
02	08	03	2.01		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Rp 58.720.200			Rp 58.720.200
02	08	03	2.01	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Rp 8.720.200	15 orang	DSPPPAPMPD	Rp 8.720.200
02	08	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	-	DSPPPAPMPD	Rp 50.000.000
02	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
02	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Yang Terbina	Rp 947.000.000			Rp 947.000.000
02	08	05	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga	Rp 947.000.000			Rp 947.000.000
02	08	05	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rp 37.000.000	5 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 37.000.000
02	08	05	2.01			Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 910.000.000	18 Laporan	DSPPPAPMPD	Rp 910.000.000
02	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)		Rp 554.000.000			Rp 554.000.000

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
02	08	06	2.01		Pelaksanaan PILA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan	Rp 479.000.000			Rp 479.000.000
02	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Rp 50.000.000	5 Organisasi	DSPPPAPMPD	Rp 50.000.000
02	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelenbagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelenbagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 429.000.000	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 429.000.000
02	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Rp 75.000.000			Rp 75.000.000
02	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 75.000.000
02	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak	Rp 250.000.000			Rp 250.000.000
02	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000			Rp 20.000.000
02	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000	3 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 20.000.000
02	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Rp 230.000.000			Rp 230.000.000
02	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten Kota	Rp 150.000.000	25 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 150.000.000
02	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	1 Layanan	DSPPPAPMPD	Rp 80.000.000
JUMLAH							Rp 1.978.720.200			Rp 1.978.720.200

Tabel : III

**RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025**

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Rp 4.200.000.000				Rp 4.200.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Yang Dibina	Rp 4.200.000.000				Rp 4.200.000.000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat Yang Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Rp 4.200.000.000				Rp 4.200.000.000
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp 200.000.000	60 Dokumen		DSPPPA/MPD	Rp 200.000.000
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 250.000.000	80 Dokumen		DSPPPA/MPD	Rp 250.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp 500.000.000	100%		DSPPPA/MPD	Rp 500.000.000
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.000.000.000	60 Desa		DSPPPA/MPD	Rp 1.000.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 300.000.000	60 Dokumen		DSPPPA/MPD	Rp 300.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 250.000.000	60 Laporan		DSPPPA/MPD	Rp 250.000.000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 500.000.000	60 Laporan		DSPPPA/MPD	Rp 500.000.000
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketrertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteritiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp 200.000.000	60 Dokumen		DSPPPA/MPD	Rp 200.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 1.000.000.000	60 Dokumen		DSPPPA/MPD	Rp 1.000.000.000
JUMLAH							Rp 4.200.000.000				Rp 4.200.000.000

Tabel : III

**RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025**

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Rp 3.825.196.572			Rp 3.826.196.572
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Batas	Rp 878.918.072			Rp 879.918.072
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 878.918.072			Rp 879.918.072
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp 18.483.000	2 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 19.483.000
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Rp 860.435.072	1 Unit	DSPPPAPMPD	Rp 860.435.072
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Rp 700.000.000			Rp 700.000.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa	Rp 700.000.000			Rp 700.000.000
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	30 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 100.000.000
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	30 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 100.000.000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 500.000.000	30 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 500.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Rp 2.246.278.500			Rp 2.246.278.500
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Peraturan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 2.246.278.500			Rp 2.246.278.500
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp 14.580.000	3 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 14.580.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 60.000.000	60 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 60.000.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 159.849.500	120 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 159.849.500
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Rp 175.000.000	3 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 175.000.000
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp 150.000.000	60 Laporan	DSPPPAPMPD	Rp 150.000.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 100.000.000	60 desa	DSPPPAPMPD	Rp 100.000.000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp 150.000.000	19 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 150.000.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Rp 250.000.000	60 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 250.000.000
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp 500.000.000	3 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 500.000.000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Rp 157.849.000	60 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 157.849.000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Rp 50.000.000	120 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 50.000.000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengawasan Batas Desa	Rp 79.000.000	15 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 79.000.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 400.000.000	60 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 400.000.000
					JUMLAH		Rp 3.825.196.572			Rp 3.826.196.572

Tabel. 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MEMPAWAH

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
1.06.2.08.2.13.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.108.769.514,00			28.243.769.514,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				13.447.055.942,00			14.432.055.942,00
37043					6.974.530.942,00			6.964.530.942,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	47.497.600,00			47.497.600,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DSPPPAPMPD	2 Dokumen	8.997.600,00	APBD		8.997.600,00
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	5 Dokumen	3.500.000,00	APBD		3.500.000,00
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	7.500.000,00	APBD		7.500.000,00
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	2 Dokumen	3.500.000,00	APBD		3.500.000,00
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	3 Dokumen	7.500.000,00	APBD		7.500.000,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DSPPPAPMPD	4 Dokumen	16.500.000,00	APBD		16.500.000,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	4.547.105.342,00			4.547.105.342,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DSPPPAPMPD	35 Orang/Bulan	4.495.457.642,00	APBD		4.495.457.642,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	31.650.000,00	APBD		31.650.000,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DSPPPAPMPD	2 Laporan	14.998.200,00	APBD		14.998.200,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DSPPPAPMPD	1 Laporan	4.999.500,00	APBD		4.999.500,00
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	12.100.000,00			12.100.000,00
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DSPPPAPMPD	12 Laporan	12.100.000,00	APBD		12.100.000,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	75.000.000,00			75.000.000,00
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DSPPPAPMPD	50 Paket	35.000.000,00	APBD		35.000.000,00
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DSPPPAPMPD	34 Orang	40.000.000,00	APBD		40.000.000,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	195.888.000,00			195.888.000,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	5.000.000,00	APBD		5.000.000,00

1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	6 Paket	20.000.000,00	APBD	20.000.000,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	10.000.000,00	APBD	10.000.000,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	31.000.000,00	APBD	31.000.000,00
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	35.000.000,00	APBD	35.000.000,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DSPPPAPMPD	34 Laporan	75.000.000,00	APBD	75.000.000,00
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	19.888.000,00	APBD	19.888.000,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	1.572.870.000,00		1.572.870.000,00
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	12 Unit	1.241.000.000,00	APBD	1.241.000.000,00
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DSPPPAPMPD	55 Unit	76.120.000,00	APBD	76.120.000,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	14 Unit	107.500.000,00	APBD	107.500.000,00
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	4 Unit	48.250.000,00	APBD	48.250.000,00
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	6 Unit	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	3 Unit	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	165.550.000,00		155.550.000,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DSPPPAPMPD	3 Laporan	101.550.000,00	APBD	101.550.000,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	3 Laporan	64.000.000,00	APBD	54.000.000,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	358.520.000,00		358.520.000,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DSPPPAPMPD	1 Unit	24.000.000,00	APBD	24.000.000,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	DSPPPAPMPD	6 Unit	45.020.000,00	APBD	45.020.000,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DSPPPAPMPD	1 Unit	15.000.000,00	APBD	15.000.000,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DSPPPAPMPD	1 Unit	243.500.000,00	APBD	243.500.000,00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DSPPPAPMPD	12 Unit	12.500.000,00	APBD	12.500.000,00
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	4 Unit	18.500.000,00	APBD	18.500.000,00
37408	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			100 %	979.525.000,00		979.525.000,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100 %	10.000.000,00		10.000.000,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DSPPPAPMPD	10 Dokumen	15.000.000,00	APBD	15.000.000,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			100 %	969.525.000,00		969.525.000,00

1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	126 Orang	319.525.000,00	APBD	319.525.000,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	9 Orang	150.000.000,00	APBD	150.000.000,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	80 Keluarga	200.000.000,00	APBD	200.000.000,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	30 Lembaga	250.000.000,00	APBD	250.000.000,00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	30 Sertifikat	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
37773	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			100 %	20.000.000,00		20.000.000,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			100 %	20.000.000,00		20.000.000,00
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarKasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	6 Orang	20.000.000,00	APBD	20.000.000,00
					-25.000.000,00		0,00
38139	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100 %	1.505.000.000,00		1.525.000.000,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			100 %	875.000.000,00		875.000.000,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	50 Orang	125.000.000,00	APBD	125.000.000,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	400 Orang	100.000.000,00	APBD	100.000.000,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	40 Orang	200.000.000,00	APBD	200.000.000,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	70 Orang	350.000.000,00	APBD	350.000.000,00
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	400 Orang	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	40 Orang	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100 %	630.000.000,00		650.000.000,00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	20 Orang	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	41 Orang	380.000.000,00	APBD	400.000.000,00

1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	2 Dokumen	200.000.000,00	APBD	200.000.000,00
38504	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100 %	2.770.000.000,00		3.020.000.000,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	100 %	120.000.000,00		120.000.000,00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	500 Orang	100.000.000,00	APBD	100.000.000,00
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	42 Orang	20.000.000,00		20.000.000,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	2.650.000.000,00		2.900.000.000,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	DSPPPAPMPD	15000 Orang	230.000.000,00	APBD	250.000.000,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	3 Keluarga	320.000.000,00	APBD	350.000.000,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	12000 Keluarga	1.900.000.000,00	APBD	2.000.000.000,00
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	100 Orang	200.000.000,00	APBD	300.000.000,00
38869	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100 %	950.000.000,00		1.650.000.000,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			100 %	700.000.000,00		1.300.000.000,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1000 Orang	500.000.000,00	APBD	800.000.000,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1000 Orang	200.000.000,00	APBD	500.000.000,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100 %	250.000.000,00		350.000.000,00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	3 Kampung	200.000.000,00	APBD	300.000.000,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	48 Orang	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
39234	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100 %	248.000.000,00		273.000.000,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100 %	248.000.000,00		273.000.000,00
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	150.000.000,00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Makam	50.000.000,00	APBD	75.000.000,00
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	2 Laporan	48.000.000,00	APBD	48.000.000,00

2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DSPPPAPMPD	5 Orang	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	429.000.000,00	APBD	429.000.000,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Indikator:		100 %	125.000.000,00		125.000.000,00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	125.000.000,00	APBD	125.000.000,00
39296	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100 %	250.000.000,00		250.000.000,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100 %	50.000.000,00		50.000.000,00
2.08.07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DSPPPAPMPD	50 Orang	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	200.000.000,00		200.000.000,00
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	40 Orang	150.000.000,00	APBD	150.000.000,00
2.08.07.2.02.07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	DSPPPAPMPD	40 Layanan	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			100 %	9.747.713.572,00		10.897.713.572,00
41307	PROGRAM PENATAAN DESA			100 %	70.000.000,00		70.000.000,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			100 %	70.000.000,00		70.000.000,00
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	DSPPPAPMPD	2 Desa	20.000.000,00	APBD	20.000.000,00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	DSPPPAPMPD	1 Unit	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
41308	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			100 %	200.000.000,00		200.000.000,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa			100 %	200.000.000,00		200.000.000,00
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	30 Dokumen	100.000.000,00	APBD	100.000.000,00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	100.000.000,00
41309	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			100 %	3.052.713.572,00		3.152.713.572,00
2.13.04.2.01	Peminaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			100 %	3.052.713.572,00		3.152.713.572,00
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	DSPPPAPMPD	3 Dokumen	14.580.000,00	APBD	14.580.000,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	60.000.000,00	APBD	60.000.000,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	DSPPPAPMPD	120 Dokumen	159.849.500,00	APBD	159.849.500,00

2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	DSPPPAPMPD	3 Orang	910.435.072,00	APBD	910.435.072,00
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DSPPPAPMPD	60 Laporan	150.000.000,00	APBD	150.000.000,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	DSPPPAPMPD	42 Dokumen	150.000.000,00	APBD	150.000.000,00
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DSPPPAPMPD	19 Laporan	150.000.000,00	APBD	250.000.000,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	250.000.000,00	APBD	250.000.000,00
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	DSPPPAPMPD	3 Dokumen	500.000.000,00	APBD	500.000.000,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	157.849.000,00	APBD	157.849.000,00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	DSPPPAPMPD	120 Orang	50.000.000,00	APBD	50.000.000,00
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	DSPPPAPMPD	15 Desa	100.000.000,00	APBD	100.000.000,00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	400.000.000,00	APBD	400.000.000,00
41310	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			100 %	6.425.000.000,00		7.475.000.000,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			100 %	6.425.000.000,00		7.475.000.000,00
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	100.000.000,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD	250.000.000,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DSPPPAPMPD	5 Lembaga	1.200.000.000,00	APBD	1.200.000.000,00
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DSPPPAPMPD	5 Unit	1.000.000.000,00	APBD	1.500.000.000,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	175.000.000,00	APBD	175.000.000,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DSPPPAPMPD	1 Laporan	200.000.000,00	APBD	200.000.000,00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DSPPPAPMPD	1 Laporan	1.500.000.000,00	APBD	1.500.000.000,00
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	150.000.000,00

2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	1.500.000.000,00	APBD	2.000.000.000,00
2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DSPPPAPMPD	20 Keluarga	200.000.000,00	APBD	200.000.000,00
2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DSPPPAPMPD	20 Keluarga	200.000.000,00	APBD	200.000.000,00

RANCANGAN AWAL RENJA OPD
TAHUN 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.06.2.08.2.13.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa		26.082.068.844,00	0,00	0,00	26.082.068.844,00	28.242.068.844,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		13.420.356.272,00	0,00	0,00	13.420.356.272,00	14.430.356.272,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.967.831.272,00	0,00	0,00	6.967.831.272,00	6.957.831.272,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	40.797.600,00	0,00	0,00	40.797.600,00	40.797.600,00	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	8.997.600,00	0,00	0,00	8.997.600,00	8.997.600,00	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (2Dokumen)	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3 Laporan)	15.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	4.547.105.672,00	0,00	0,00	4.547.105.672,00	4.547.105.672,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (35 Orang/bulan)	4.495.457.972,00	0,00	0,00	4.495.457.972,00	4.495.457.972,00	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 Dokumen)	31.650.000,00	0,00	0,00	31.650.000,00	31.650.000,00	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan)	14.998.200,00	0,00	0,00	14.998.200,00	14.998.200,00	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (1 Laporan)	4.999.500,00	0,00	0,00	4.999.500,00	4.999.500,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (12 Laporan)	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (35 Paket)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (50 Orang)	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	195.888.000,00	0,00	0,00	195.888.000,00	195.888.000,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (1 Paket)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (35 Laporan)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1 Dokumen)	19.888.000,00	0,00	0,00	19.888.000,00	19.888.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator: Sasaran:	1.572.870.000,00	0,00	0,00	1.572.870.000,00	1.572.870.000,00	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (12 Unit)	1.241.000.000,00	0,00	0,00	1.241.000.000,00	1.241.000.000,00	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (78 Unit)	76.120.000,00	0,00	0,00	76.120.000,00	76.120.000,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (14 Unit)	107.500.000,00	0,00	0,00	107.500.000,00	107.500.000,00	
1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (4 Unit)	48.250.000,00	0,00	0,00	48.250.000,00	48.250.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (6 Unit)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (3 Unit)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	165.550.000,00	0,00	0,00	165.550.000,00	155.550.000,00	
		Sasaran:	Target:					
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (3 Laporan)	101.550.000,00	0,00	0,00	101.550.000,00	101.550.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	54.000.000,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	358.520.000,00	0,00	0,00	358.520.000,00	358.520.000,00	
		Sasaran:	Target:					
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (1 Unit)	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (6 Unit)	45.020.000,00	0,00	0,00	45.020.000,00	45.020.000,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (1 Unit)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2 Unit)	243.500.000,00	0,00	0,00	243.500.000,00	243.500.000,00	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (12 Unit)	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (6 Unit)	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		984.525.000,00	0,00	0,00	984.525.000,00	984.525.000,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (10 Dokumen)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	969.525.000,00	0,00	0,00	969.525.000,00	969.525.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (85 Orang)	Target:					
			319.525.000,00	0,00	0,00	319.525.000,00	319.525.000,00	
			150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
			200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
			250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (9 Orang)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Keluarga)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Lembaga)	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Sertifikat)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Indikator:	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Orang)	Target:					
			20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
			1.480.000.000,00	0,00	0,00	1.480.000.000,00	1.525.000.000,00	
			850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	875.000.000,00	
			100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	125.000.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.480.000.000,00	0,00	0,00	1.480.000.000,00	1.525.000.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Indikator:	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	875.000.000,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (150 Orang)	Target:					
			100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	125.000.000,00	
25028-034	Desa Peniti Luar		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Orang)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Orang)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	Alat Bantu Dengar		6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
	Alat Bantu Kursi Roda		14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	
	Alat Bantu Kaki Palsu		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
	Alat Bantu Tongkat		6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
25017-002	Desa Sungai Rasau		33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00	
25024-016	Desa Galang		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
25018-061	desa sungai bakau besar darat		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (50 Orang)	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (400 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Indikator:	630.000.000,00	0,00	0,00	630.000.000,00	650.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (9564 Orang)	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	400.000.000,00	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (4 Dokumen)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		2.770.000.000,00	0,00	0,00	2.770.000.000,00	3.020.000.000,00	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Indikator:	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Orang)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (50 Orang)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	2.650.000.000,00	0,00	0,00	2.650.000.000,00	2.900.000.000,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (161258 Orang)	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	250.000.000,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (22274 Keluarga)	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	350.000.000,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (12000 Keluarga)	1.900.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	2.000.000.000,00	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Orang)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	300.000.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		950.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00	1.650.000.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	1.300.000.000,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (1200 Orang)	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	800.000.000,00	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (1200 Orang)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	500.000.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	350.000.000,00	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (4 Kampung)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	300.000.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (48 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000,00	273.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000,00	273.000.000,00	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (7 Makam)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (1 Laporan)	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.914.000.000,00	0,00	0,00	2.914.000.000,00	2.914.000.000,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (70 Orang)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (2 Dokumen)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (4 Dokumen)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (4 Perangkat Daerah)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (15 Orang)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (1 Layanan)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		1.695.000.000,00	0,00	0,00	1.695.000.000,00	1.695.000.000,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	1.695.000.000,00	0,00	0,00	1.695.000.000,00	1.695.000.000,00	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (4 Dokumen)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	1.625.000.000,00	0,00	0,00	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		604.000.000,00	0,00	0,00	604.000.000,00	604.000.000,00	
2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	479.000.000,00	0,00	0,00	479.000.000,00	479.000.000,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (35 Organisasi)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (2 Dokumen)	429.000.000,00	0,00	0,00	429.000.000,00	429.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.08.06.2.02	Kabupaten Mempawah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (50 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (40 Orang)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (40 Layanan)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		9.747.712.572,00	0,00	0,00	9.747.712.572,00	10.897.712.572,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Indikator: Sasaran:	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (2 Desa)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (1 Unit)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Indikator: Sasaran:	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (1 Dokumen)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3.052.712.572,00	0,00	0,00	3.052.712.572,00	3.152.712.572,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Indikator:	3.052.712.572,00	0,00	0,00	3.052.712.572,00	3.152.712.572,00	
		Sasaran:						
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (3 Dokumen)	14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (60 Dokumen)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (60 Dokumen)	159.849.500,00	0,00	0,00	159.849.500,00	159.849.500,00	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (60 Orang)	910.435.072,00	0,00	0,00	910.435.072,00	910.435.072,00	
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (2 Laporan)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (1 Dokumen)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (11 Laporan)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	250.000.000,00	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (60 Dokumen)	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (1 Dokumen)	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (60 Dokumen)	157.848.000,00	0,00	0,00	157.848.000,00	157.848.000,00	
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (60 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (15 Desa)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (9 Dokumen)	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		6.425.000.000,00	0,00	0,00	6.425.000.000,00	7.475.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	6.425.000.000,00	0,00	0,00	6.425.000.000,00	7.475.000.000,00	
2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (1 Dokumen)	Target: 100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (1 Dokumen)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (5 Lembaga)	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
25064-005	Desa Pasir Palembang		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
25018-017	desa sungai bakau besar darat		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
25028-032	Desa Peniti Luar		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (5 Unit)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
25016-014	Sambora		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (1 Dokumen)	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (1 Laporan)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (1 Laporan)	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa (1 Dokumen)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (1 Dokumen)	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (20 Keluarga)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (20 Keluarga)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	